

## MATRIKS PERBANDINGAN

### PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 28 TAHUN 2022 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN BANYUMAS SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 34 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 28 TAHUN 2022 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN BANYUMAS

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Banyumas	Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Banyumas
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS,	BUPATI BANYUMAS,
Menimbang:	Menimbang:
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang bermutu dan berkeadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>b. bahwa untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan, dibutuhkan penataan dan perbaikan dalam penerimaan peserta didik baru dengan mempertimbangkan perkembangan layanan kebutuhan pendidikan di masyarakat;</li> <li>c. bahwa Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2021/2022 di Kabupaten Banyumas masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan layanan pendidikan di masyarakat serta penyesuaian tata cara penerimaan peserta didik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Banyumas telah diatur dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Banyumas;</li> <li>b. bahwa untuk memperluas kesempatan bagi calon peserta didik untuk mendapatkan pelayanan pendidikan dasar, perlu mengubah pengaturan zonasi di wilayah Kabupaten Banyumas;</li> <li>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada</li> </ul>

<p>baru terhadap situasi darurat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sehingga perlu diganti;</p> <p>d. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan Penerimaan Peserta Didik Baru sesuai dengan kewenangannya;</p> <p>e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Banyumas;</p>	<p>Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Banyumas;</p>
<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42),</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia</li> </ol>

<p>Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);</p> <p>6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195 );</p> <p>7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);</p> <p>8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);</p> <p>9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 71 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 71);</p> <p>10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 48);</p>	<p>Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);</p> <p>6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);</p> <p>7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);</p> <p>8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);</p> <p>9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 71 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 71);</p>
---	---

	<p>10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 48);</p> <p>11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 28);</p>
<p style="text-align: center;"><b>MEMUTUSKAN:</b></p> <p>Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN BANYUMAS.</p>	<p style="text-align: center;"><b>MEMUTUSKAN:</b></p> <p>Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 28 TAHUN 2022 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN BANYUMAS.</p>
<p style="text-align: center;"><b>BAB I</b> <b>KETENTUAN UMUM</b> Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.</li> <li>2. Bupati adalah Bupati Banyumas.</li> <li>3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.</li> <li>4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.</li> <li>5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.</li> <li>6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal I</b></p> <p>Ketentuan Pasal 18 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 28) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>

<p>akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Sekolah adalah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.</li> <li>8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.</li> <li>9. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.</li> <li>10. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.</li> <li>11. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.</li> <li>12. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah.</li> <li>13. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, dan SMP.</li> <li>14. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah.</li> <li>15. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan</li> </ol>	
---	--

<p>yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.</p> <p>16. Zonasi adalah penetapan pembagian suatu wilayah dalam rangka penerimaan peserta didik baru oleh Bupati.</p> <p>17. Dalam Jaringan yang selanjutnya disingkat daring adalah sistem pengelolaan kegiatan yang sama dengan melibatkan sejumlah pihak melalui penggunaan aplikasi khusus, dioperasikan oleh suatu organisasi induk pada waktu bersamaan dan harus didukung oleh jaringan internet.</p> <p>18. Luar Jaringan yang selanjutnya disingkat Luring adalah sistem pengelolaan kegiatan yang sama atau berbeda dengan melibatkan satu atau beberapa pihak, tanpa pembuatan aplikasi khusus, tidak dioperasikan oleh suatu organisasi induk pada waktu bersamaan dan tidak harus didukung oleh jaringan internet.</p> <p>19. PPDB Jalur Zonasi adalah suatu kegiatan penerimaan peserta didik baru dengan pertimbangan utama berupa wilayah domisili terdekat calon peserta didik baru dengan SMP yang dipilih.</p> <p>20. Jalur Afirmasi adalah jalur khusus untuk calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.</p> <p>21. Peserta Didik Baru adalah calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima dalam seleksi penerimaan peserta didik.</p> <p>22. Nilai Akademik adalah total nilai Ujian Satuan Pendidikan (USP) yang diperoleh siswa.</p> <p>23. Prestasi adalah hasil yang dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti Ujian Satuan Pendidikan (USP) dan/atau kejuaraan Akademik dan/atau Non Akademik.</p> <p>24. Penghargaan adalah surat resmi yang berisi tentang pernyataan atau penegasan tentang pemberian hak atas prestasi di bidang akademis, olahraga, seni atau lainnya yang diterima oleh siswa, baik secara</p>	
---	--

<p>individu maupun kelompok dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang dapat berupa dokumen, sertifikat, prasasti dan/atau ijazah.</p> <p>25. Perpindahan tugas adalah seseorang karena kedudukannya harus melaksanakan tugas ke tempat lain yang berbeda dengan alamat domisilinya di Kartu Keluarga/Kartu Tanda Penduduk.</p> <p>26. Orangtua/wali Calon Peserta Didik Baru adalah seseorang yang karena kedudukannya bertanggungjawab langsung terhadap calon peserta didik.</p> <p>27. Kartu Keluarga adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan pedoman bagi Panitia Penyelenggara PPDB pada semua tingkatan untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan.</li> <li>b. memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait dengan proses dan tahapan penyelenggaraan PPDB di Kabupaten Banyumas.</li> </ol>	
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tata cara penerimaan peserta didik baru;</li> <li>b. pendataan ulang dan pemutakhiran data;</li> <li>c. perpindahan peserta didik; dan</li> <li>d. pelaporan dan pengawasan.</li> </ol>	
<p style="text-align: center;"><b>BAB II</b> <b>TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU</b> Bagian Kesatu Penerimaan Peserta Didik Pasal 4</p> <p>(1) PPDB dilaksanakan secara :</p>	

<p>a. obyektif; b. transparan; dan c. akuntabel.</p> <p>(2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Persyaratan Pasal 5</p> <p>Calon peserta didik baru pada TK harus memenuhi persyaratan :</p> <p>a. berusia paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan b. berusia paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD harus memenuhi persyaratan:</p> <p>a. berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun; atau b. berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dan pernah mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini minimal 1 (satu) tahun pada lembaga yang memiliki ijin operasional dari Dinas.</p> <p>(2) Dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun.</p> <p>(3) Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki:</p> <p>a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan b. kesiapan psikis.</p>	



<p>(4) Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.</p> <p>(5) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi persyaratan:</p> <p>a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan</p> <p>b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 dibuktikan dengan :</p> <p>a. akta kelahiran; atau</p> <p>b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.</p> <p>(2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria:</p> <p>a. menyelenggarakan pendidikan khusus;</p> <p>b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan/atau</p> <p>c. berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b harus dibuktikan dengan:</p> <p>a. ijazah; atau</p> <p>b. dokumen lain yang menyatakan kelulusan.</p>	

<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, calon peserta didik dari sekolah di luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar.</p> <p>(2) Permohonan surat rekomendasi izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMP.</p> <p>(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk calon peserta didik warga negara Indonesia dan warga negara asing.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Bagi sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing wajib menyelenggarakan matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.</p> <p>(2) Dalam hal sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa peringatan tertulis.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Calon peserta didik penyandang disabilitas di sekolah dikecualikan dari ketentuan persyaratan:</p> <p>a. batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7; dan</p> <p>b. ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Jalur Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru Paragraf 1 Umum Pasal 13</p>	

<p>(1) PPDB untuk SD dan SMP dilaksanakan melalui jalur pendaftaran PPDB.</p> <p>(2) Jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. zonasi;</li> <li>b. afirmasi;</li> <li>c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau</li> <li>d. prestasi.</li> </ol>	
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Dalam proses seleksi PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak menggunakan ujian tertulis atau tes kemampuan akademik.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. jalur zonasi SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung Sekolah;</li> <li>b. jalur zonasi SMP paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari daya tampung Sekolah.</li> </ol> <p>(2) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah.</p> <p>(3) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.</p> <p>(4) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) huruf d paling banyak 20% (dua puluh persen) dari daya tampung Sekolah.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.</p>	

<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikecualikan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;</li> <li>b. Sekolah kerja sama;</li> <li>c. Sekolah Indonesia di luar negeri;</li> <li>d. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;</li> <li>e. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;</li> <li>f. Sekolah berasrama/boarding school;</li> <li>g. Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan</li> <li>h. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.</li> </ol> <p>(2) Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya dan dilaporkan kepada direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Jalur Zonasi Pasal 18</p> <p>(1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Bupati.</p> <p>(2) Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. zona 1 yaitu desa/kelurahan lokasi suatu sekolah berada.</li> <li>b. zona 2 yaitu desa/kelurahan di luar zona 1 dalam wilayah kecamatan suatu sekolah berada.</li> <li>c. zona 3 adalah desa/kelurahan di luar kecamatan dalam kabupaten suatu sekolah berada.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah Zonasi yang ditetapkan Bupati.</p> <p>(2) Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Zonasi 1 yaitu desa/kelurahan atau gabungan desa/kelurahan lokasi suatu Sekolah berada.</li> <li>b. Zonasi 2 yaitu desa/kelurahan di luar Zonasi 1 dalam wilayah kecamatan suatu sekolah berada atau gabungan desa/kelurahan dalam kecamatan-kecamatan yang saling berbatasan dengan kecamatan lokasi Sekolah berada.</li> </ol>

<p>(3) Desa/Kelurahan di luar wilayah Daerah yang berbatasan langsung dengan wilayah Daerah, ditetapkan sama dengan zona 3 sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c.</p> <p>(4) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga.</p>	<p>c. Zonasi 3 adalah desa/kelurahan di luar Zonasi 1 dan Zonasi 2 dalam wilayah Daerah.</p> <p>(3) Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p> <p>(4) Desa/kelurahan di luar wilayah Daerah yang berbatasan langsung dengan wilayah Daerah, ditetapkan sama dengan Zonasi 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.</p> <p>(5) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga minimal 1 (satu) tahun sebelum PPDB.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.</p> <p>(2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. jalur afirmasi; atau</li> <li>b. jalur prestasi,</li> </ol> <p>di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah.</p> <p>(2) Penetapan wilayah zonasi oleh Bupati pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. sebaran sekolah;</li> <li>b. data sebaran domisili calon peserta didik; dan</li> <li>c. kapasitas daya tampung sekolah yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut.</li> </ol>	

<p>(3) Bupati sesuai dengan kewenangannya memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan wilayah zonasi sesuai dengan jenjang pendidikan.</p> <p>(4) Dinas memastikan bahwa semua Sekolah telah menerima peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.</p> <p>(5) Penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.</p> <p>(6) Dalam menetapkan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melibatkan musyawarah atau kelompok kerja kepala sekolah/musyawarah kerja kepala sekolah.</p> <p>(7) Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan kabupaten, penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan secara tertulis antar Pemerintah Daerah.</p> <p>(8) Bupati melaporkan penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui unit pelaksana teknis yang membidangi penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Jalur Afirmasi Pasal 21</p> <p>(1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b diperuntukkan bagi peserta didik baru :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan/atau</li> <li>b. penyandang disabilitas.</li> </ol> <p>(2) Peserta didik yang melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik baru yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.</p> <p>(3) Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan oleh Bupati,</p>	

<p>maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a wajib menyertakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan</li> <li>b. surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.</li> </ol> <p>(2) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p> <p>(3) Pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 4 Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali Pasal 23</p> <p>(1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. instansi;</li> <li>b. lembaga;</li> </ol>	

<p>c. kantor; atau d. perusahaan yang mempekerjakan.</p> <p>(2) Dalam hal terdapat kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka dapat dialokasikan untuk calon peserta didik yang merupakan anak guru dan Tenaga Kependidikan di Sekolah yang bersangkutan.</p> <p>(3) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 5 Jalur Prestasi Pasal 24</p> <p>(1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d ditentukan berdasarkan:</p> <p>a. nilai sekolah/madrasah (NS/M) yang dilampirkan dengan surat keterangan nilai rata-rata rapor peserta didik dari sekolah/madrasah asal; dan/atau</p> <p>b. prestasi di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota atau tingkat kecamatan jika jenis kejuaraan berjenjang.</p> <p>(2) Nilai rata-rata rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir.</p> <p>(3) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.</p> <p>(4) Pemalsuan terhadap bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan PPDB secara teknis diatur dalam Petunjuk Teknis PPDB yang diterbitkan oleh Kepala Dinas.</p>	



<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Paragraf 1 Tahapan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pasal 26</p> <p>Tahapan Pelaksanaan PPDB meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengumuman pendaftaran;</li> <li>b. pendaftaran;</li> <li>c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;</li> <li>d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan</li> <li>e. daftar ulang.</li> </ol>	
<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Dalam tahapan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud Pasal 26 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dilarang memungut biaya; dan</li> <li>b. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan</li> <li>2. Melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.</li> </ol> </li> </ol> <p>(2) Pelanggaran ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Pengumuman Pendaftaran Pasal 28</p>	

<p>(1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dilakukan secara terbuka.</p> <p>(2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan</li> <li>b. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOS.</li> </ol> <p>(3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat minggu ketiga bulan Mei.</p> <p>(4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;</li> <li>b. tanggal pendaftaran;</li> <li>c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi;</li> <li>d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 SD dan kelas 7 SMP, sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam Dapodik; dan</li> <li>e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.</li> </ol> <p>(5) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui papan pengumuman Sekolah maupun media lainnya.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Pendaftaran Pasal 29</p> <p>(1) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme daring.</p>	

<p>(2) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan.</p> <p>(3) Pelaksanaan mekanisme daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.</p> <p>(4) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luring dengan melampirkan fotokopy dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 4 Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru SD Pasal 30</p> <p>(1) Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); dan</li> <li>b. jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.</li> </ol> <p>(2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah.</p> <p>(3) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 5 Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru SMP Pasal 31</p> <p>(1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP menggunakan jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali, dan prestasi.</p> <p>(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan mekanisme daring.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 32</p>	

<p>(1) Sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili dalam zona 1 (satu).</p> <p>(2) Dalam hal terdapat sisa kuota dalam zona 1 yang belum terpenuhi, maka dilakukan seleksi untuk calon siswa yang berdomisili di zona 2 dan zona 3.</p> <p>(3) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang berdomisili pada zona 2 dan zona 3 dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Skor wilayah tempat tinggal ke SMP sesuai dengan ketentuan zonasi, bobot 60% (enam puluh persen);</li> <li>b. Skor Nilai Sekolah/Madrasah atau bentuk lain yang sederajat, bobot 30% (tiga puluh persen); dan</li> <li>c. Skor prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui SMP sesuai dengan hasil skoring dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, bobot 10% (sepuluh persen).</li> </ol> <p>(4) Jika jumlah skor akhir PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama, maka memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.</p> <p>(5) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka Sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(2) Dinas sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama.</p>	

<p>(3) Dalam hal daya tampung Sekolah lain pada wilayah zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke Sekolah lain dalam wilayah zonasi terdekat.</p> <p>(4) Penyaluran peserta didik ke Sekolah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.</p> <p>(6) Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam standar nasional pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau</li> <li>b. menambah ruang kelas baru.</li> </ol>	
<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>Dalam hal daya tampung untuk jalur afirmasi atau jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>Dalam hal daya tampung untuk jalur prestasi tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan dengan penentuan pemeringkatan nilai prestasi oleh Sekolah.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>Dalam hal kuota jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua, dan jalur prestasi tidak terpenuhi, maka kuota dialihkan ke jalur zonasi.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 5 Pengumuman Penetapan Pasal 37</p>	

<p>(1) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.</p> <p>(2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala Sekolah.</p> <p>(3) Dalam hal kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 6 Daftar Ulang Pasal 38</p> <p>(1) Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima di sekolah.</p> <p>(2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB III PENDATAAN ULANG DAN PEMUTAKHIRAN DATA Pasal 39</p> <p>(1) Sekolah melakukan pendataan ulang untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan.</p> <p>(2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memungut biaya.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>Sekolah melakukan pengisian dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB IV</p>	

<p style="text-align: center;"><b>PERPINDAHAN PESERTA DIDIK</b> Pasal 41</p> <p>(1) Perpindahan peserta didik antar Sekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan kepala Sekolah yang dituju.</p> <p>(2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.</p> <p>(3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>(1) Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Kabupaten Banyumas setelah memenuhi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;</li> <li>b. surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan kewenangan; dan</li> <li>c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.</li> </ol> <p>(2) Peserta didik setara SMP di negara lain dapat diterima di SMP di Kabupaten Banyumas setelah memenuhi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;</li> <li>b. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;</li> <li>c. surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah; dan</li> <li>d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.</li> </ol>	

<p style="text-align: center;">Pasla 43</p> <p>(1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.</p> <p>(2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan</li> <li>b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.</li> </ol> <p>(3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal/informal ke sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB V PELAPORAN DAN PENGAWASAN Pasal 44</p> <p>(1) Sekolah melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar Sekolah setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(2) Dinas wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.</p> <p>(3) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman <a href="http://ppdb.banyumaskab.go.id">http://ppdb.banyumaskab.go.id</a></p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kementerian melalui unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kepada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat di wilayahnya.</p>	



<p style="text-align: center;"><b>BAB VI</b> <b>KETENTUAN PENUTUP</b> <b>Pasal 47</b></p> <p>Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2021/2022 di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 48</b></p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal II</b></p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>
<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.</p>	<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.</p>
<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal 9 Juni 2022 BUPATI BANYUMAS, ttd. ACHMAD HUSEIN</p>	<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal 13 Juni 2023 BUPATI BANYUMAS, ttd. ACHMAD HUSEIN</p>
<p style="text-align: center;">Diundangkan di Purwokerto pada tanggal 9 Juni 2022</p>	<p style="text-align: center;">Diundangkan di Purwokerto pada tanggal 13 Juni 2023</p>
<p style="text-align: center;">SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS, ttd. WAHYU BUDI SAPTONO</p>	<p style="text-align: center;">SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS, ttd. WAHYU BUDI SAPTONO</p>
<p style="text-align: center;">BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022 NOMOR 28</p>	<p style="text-align: center;">BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023 NOMOR 34</p>
<p style="text-align: center;">LAMPIRAN</p>	<p style="text-align: center;">LAMPIRAN</p>